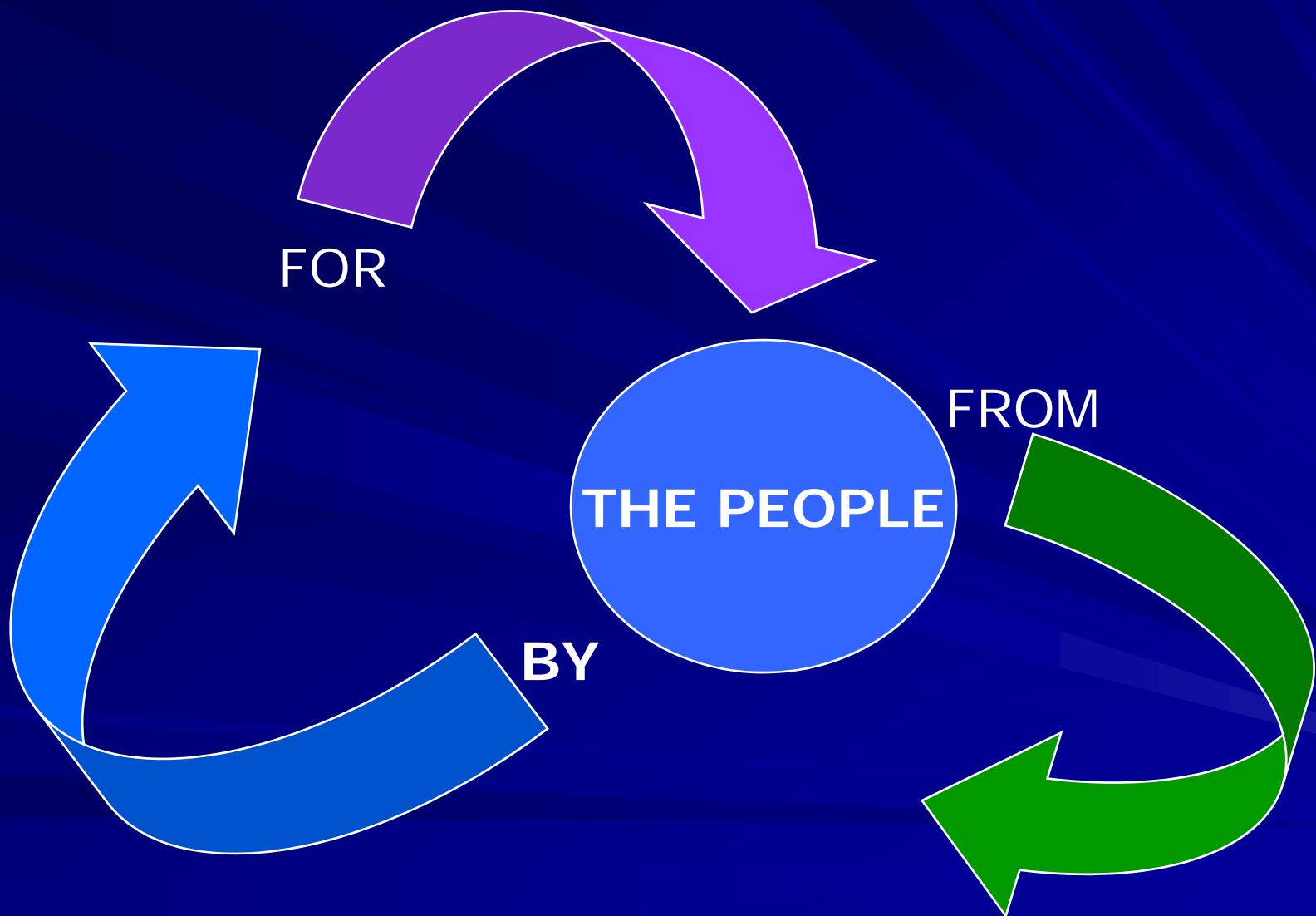


DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

(Bahan Sajian dan Diskusi dalam SUSCADOS PKn,
12-23 Desember 2005, DI BADIKLAT HANKAM,Jakarta)



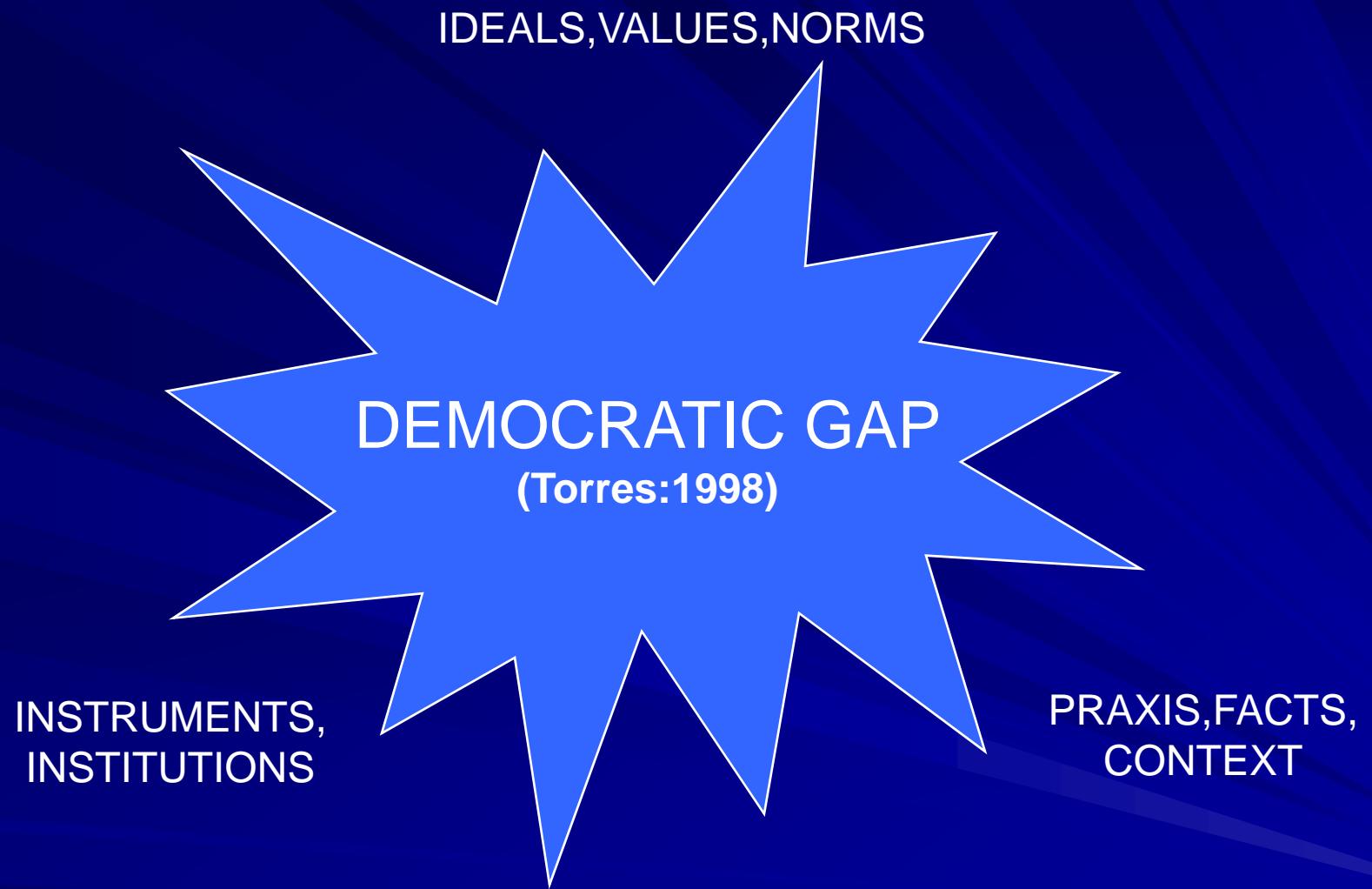
KONSEP DASAR DEMOKRASI



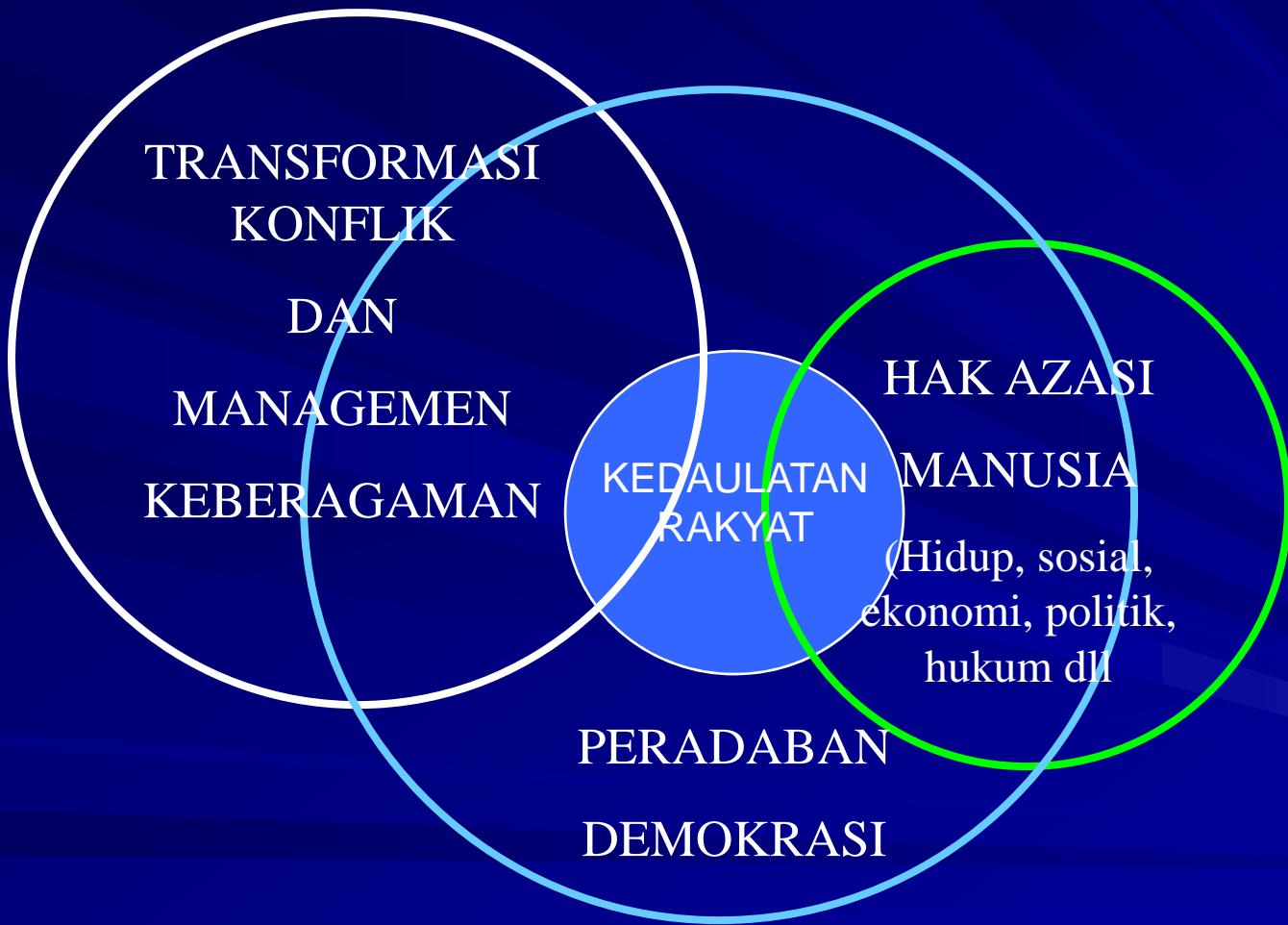
KRITERIA NEGARA DEMOKRASI

(International Conference of Jurists, Bangkok, 1965)

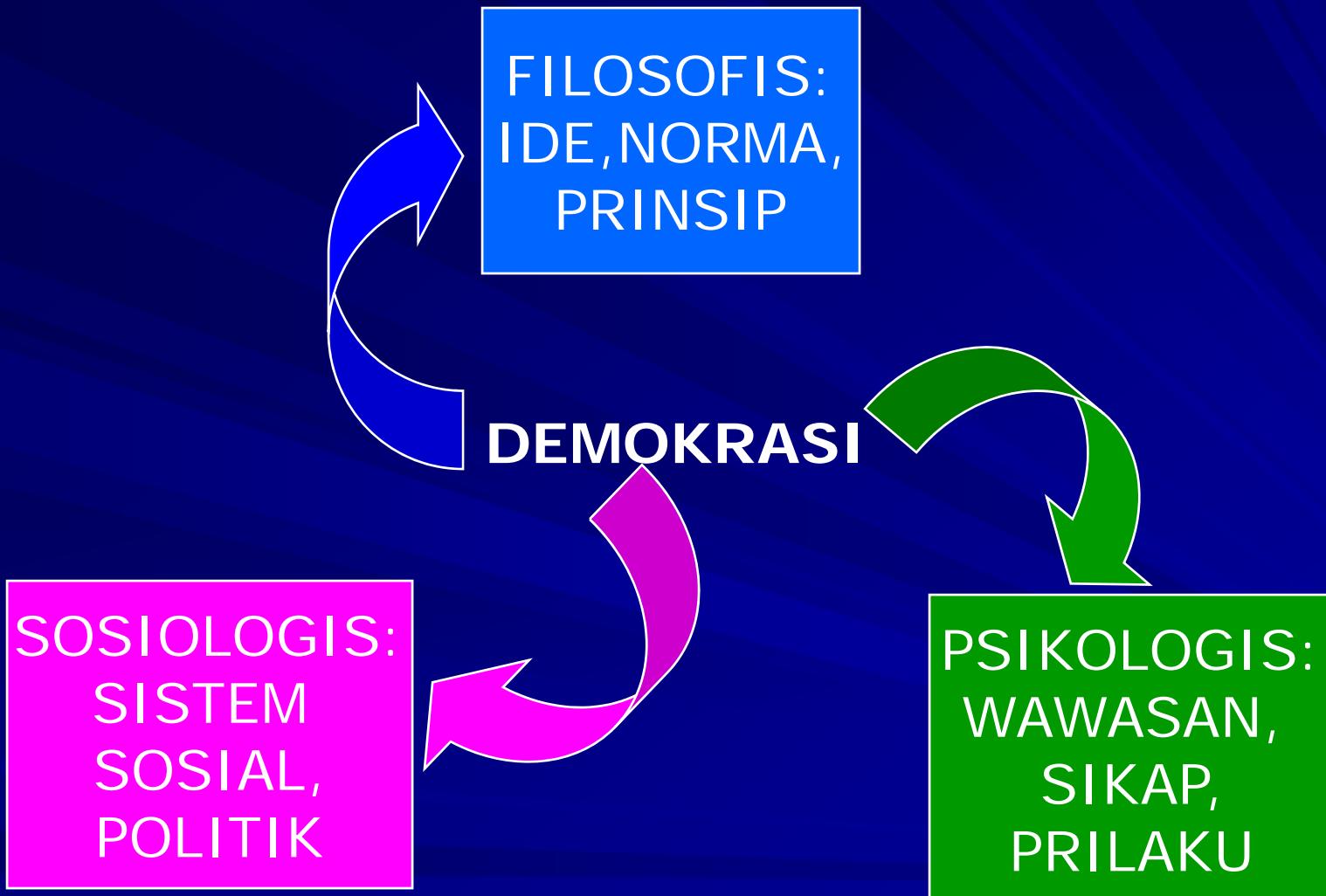
- *Supremacy of Law* (Hukum di atas segala hal)
- *Equality before the Law* (Persamaan di hadapan hukum)
- *Constitutional guarantee of Human Rights* (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
- *Impartial Tribune* (Peradilan yang tidak memihak)
- *Civic education* (Pendidikan kewarganegaraan)



INTERRELASI DEMOKRASI, HAM, DAN TRANSFORMASI KONFLIK



MULTIDIMENSIONALITAS DEMOKRASI





- PROTECTIVE DEMOCRACY > KEKUASAAN EKONOMI PASAR
- DEVELOPMENTAL DEMOCRACY > PARTISIPASI DEMOKRATIS
- EQUILIBRIUM DEMOCRACY/PLURALIST DEMOCRACY > INTERAKSI APATISME DENGAN PARTISIPASI
- PARTICIPATORY DEMOCRACY > PERUBAHAN SOSIAL DAN PARTISIPASI DEMOKRATIS



DEMOKRASI
(Huntington:1991)

Demokratis=
pemilu adil,
jujur, berkala

- DINAMIKA PEMIKIRAN DAN PRAKSIS SEPANJANG SEJARAH**
- DEMOKRASI MODERN SBG DEMOKRASI NEGARA KEBANGSAAN**
- GELOMBANG DEMOKRASI DAN GELOMBANG BALIK DEMOKRASI**

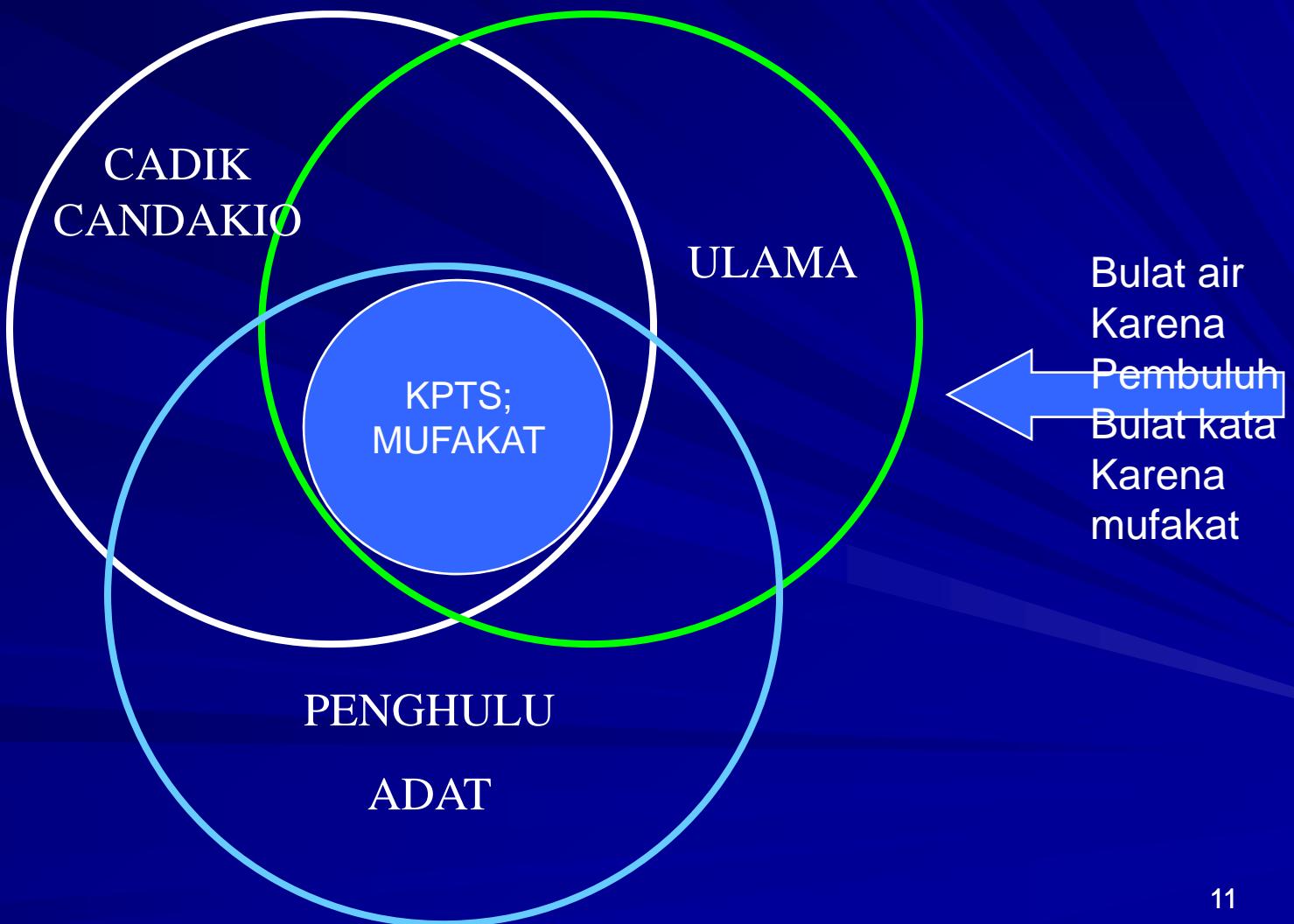
Demokrasi dlm Piagam Madinah (Sukidi dalam Tilaar:1999)

- Kebebasan beragama
- Persaudaraan seagama
- Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama
- Saling membantu
- Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd. Negara
- Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara

Demokrasi dlm Piagam Madinah (Lanjutan)

- Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu
- Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian
- Pengakuan hak atas setiap orang atau individu

KONSEP DAN PRAKSIS DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU



PILAR DEMOKRASI

(USIS:1995)

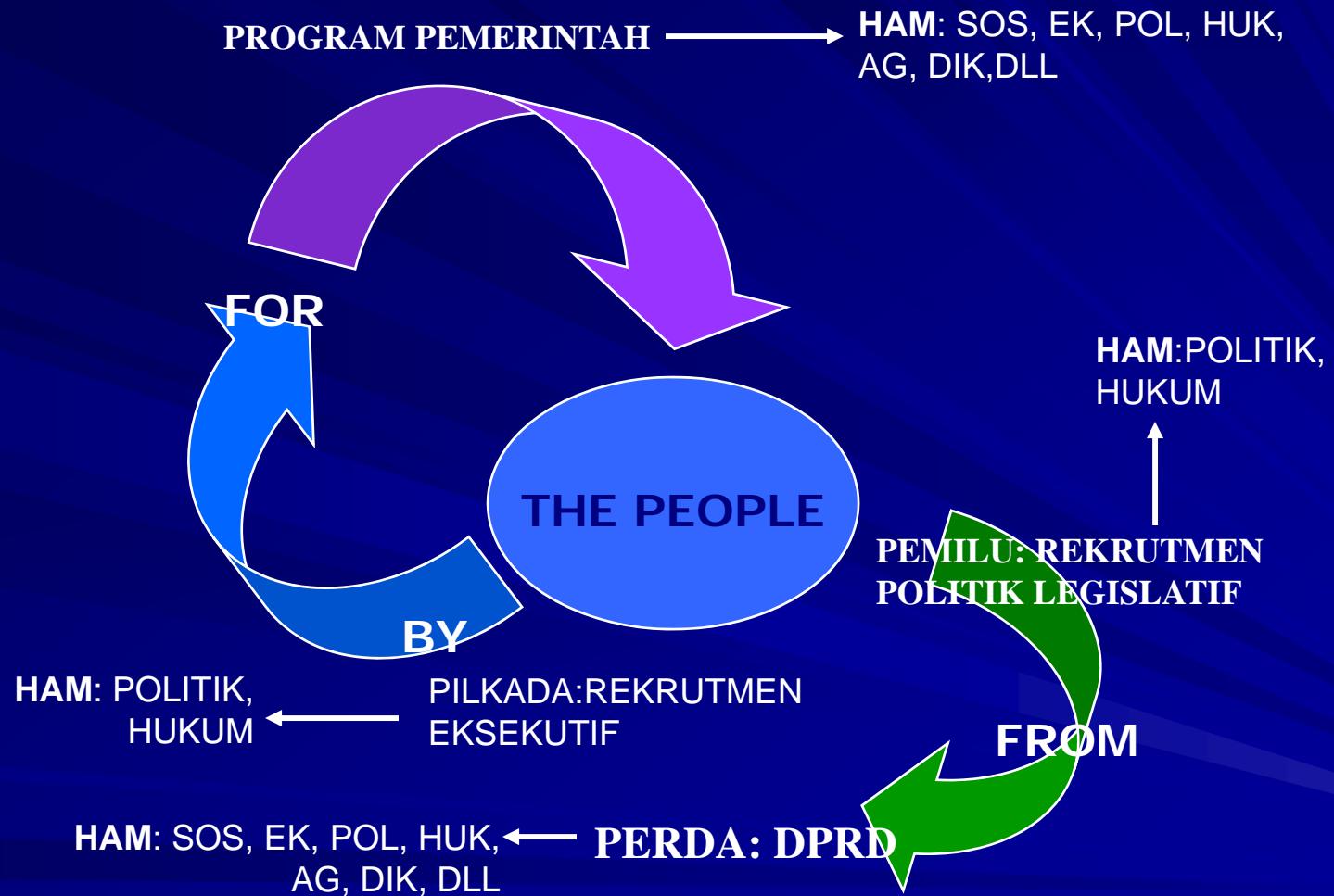
- KEDAULATAN RAKYAT
- PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG DIPERINTAH
- KEKUASAAN MAYORITAS
- HAK-HAK MINORITAS
- JAMINAN HAK AZASI MANUSIA
- PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR
- PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM
- PROSES HUKUM YANG WAJAR
- PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL
- PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK
- NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME,KERJASAMA DAN MUFAKAT

PILAR DEMOKRASI INDONESIA

(UUD 1945, Sanusi:1998)

- DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA
- DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN
- DEMOKRASI YANG BERKEDAU LATAN RAKYAT
- DEMOKRASI DENGAN *RULE OF LAW*
- DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
- DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA
- DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA
- DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH
- DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN
- DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL

PRAKSIS DEMOKRASI



OTOSENTRISITAS DEMOKRASI

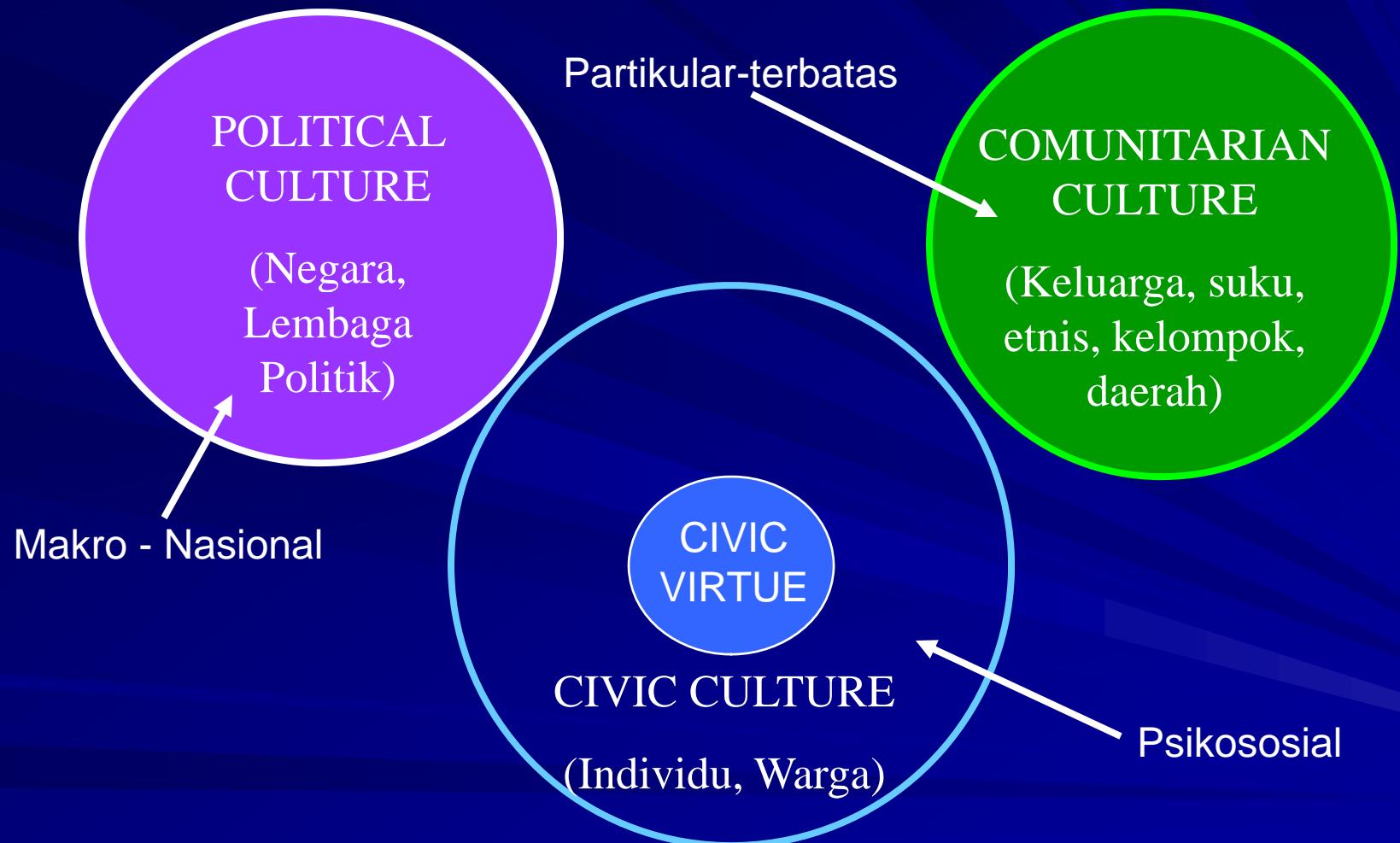




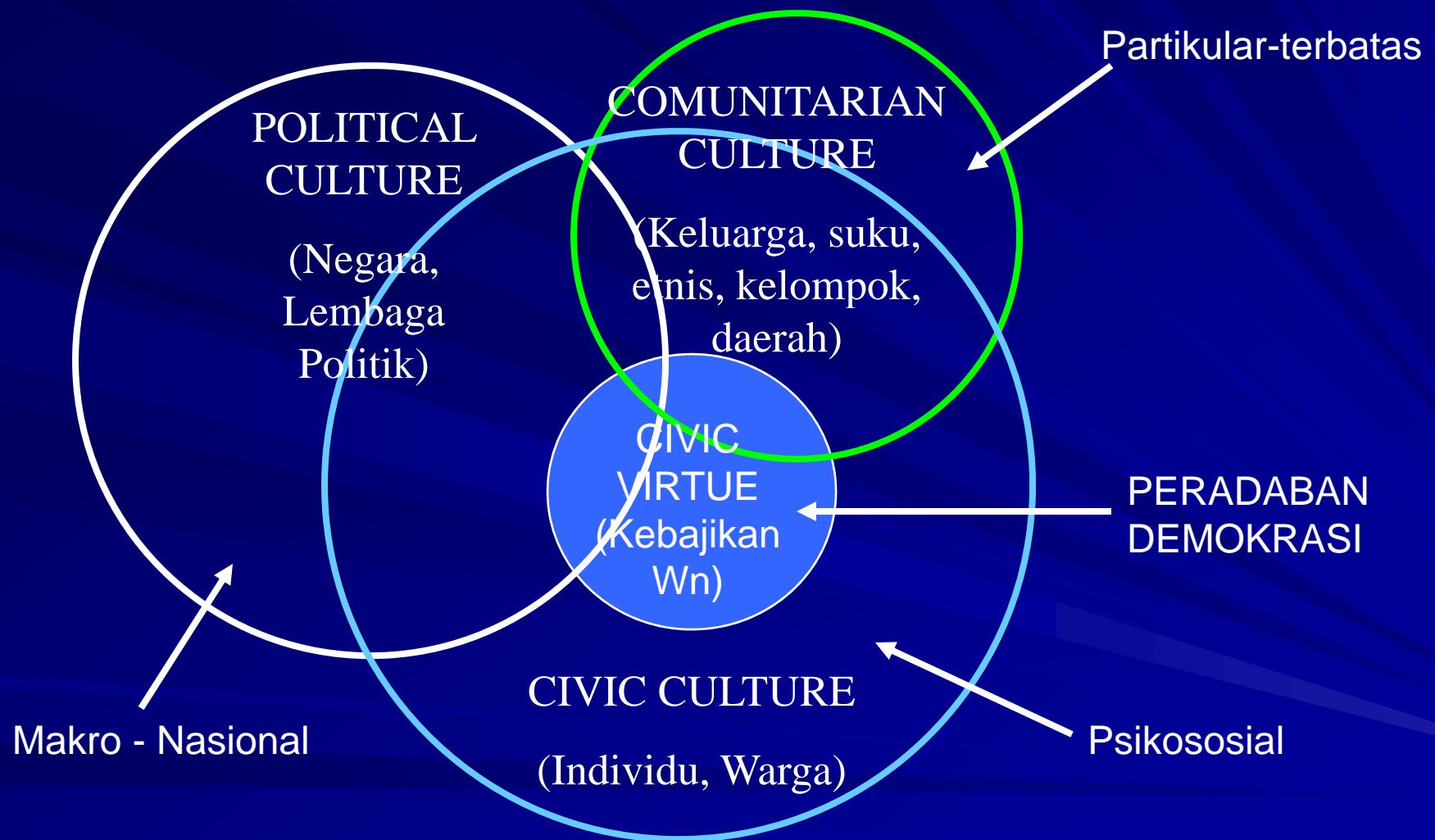
APA CIVIC CULTURE DAN POLITICAL CULTURE?

<i>CIVIC CULTURE</i>	<i>POLITICAL CULTURE</i>
<ul style="list-style-type: none">■ PERANGKAT IDE■ DIWUJUDKAN DLM REPRESENTASI BUDAYA■ UNTUK MEMBENTUK IDENTITAS KEWARGANEGARAN■ ADAPTASI PSIKOSOSIAL	<ul style="list-style-type: none">■ CARA BERPIKIR■ KHAS DAN TERPOLA■ UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI■ KONTEKS SOSIOPOLITIS

MENGAPA DAN BAGAIMANA CIVIC CULTURE (1)?



MENGAPA DAN BAGAIMANA CIVIC CULTURE (2)?



CIVIC CULTURE SEBAGAI KARAKTER BANGSA DAN PERADABAN DEMOKRASI



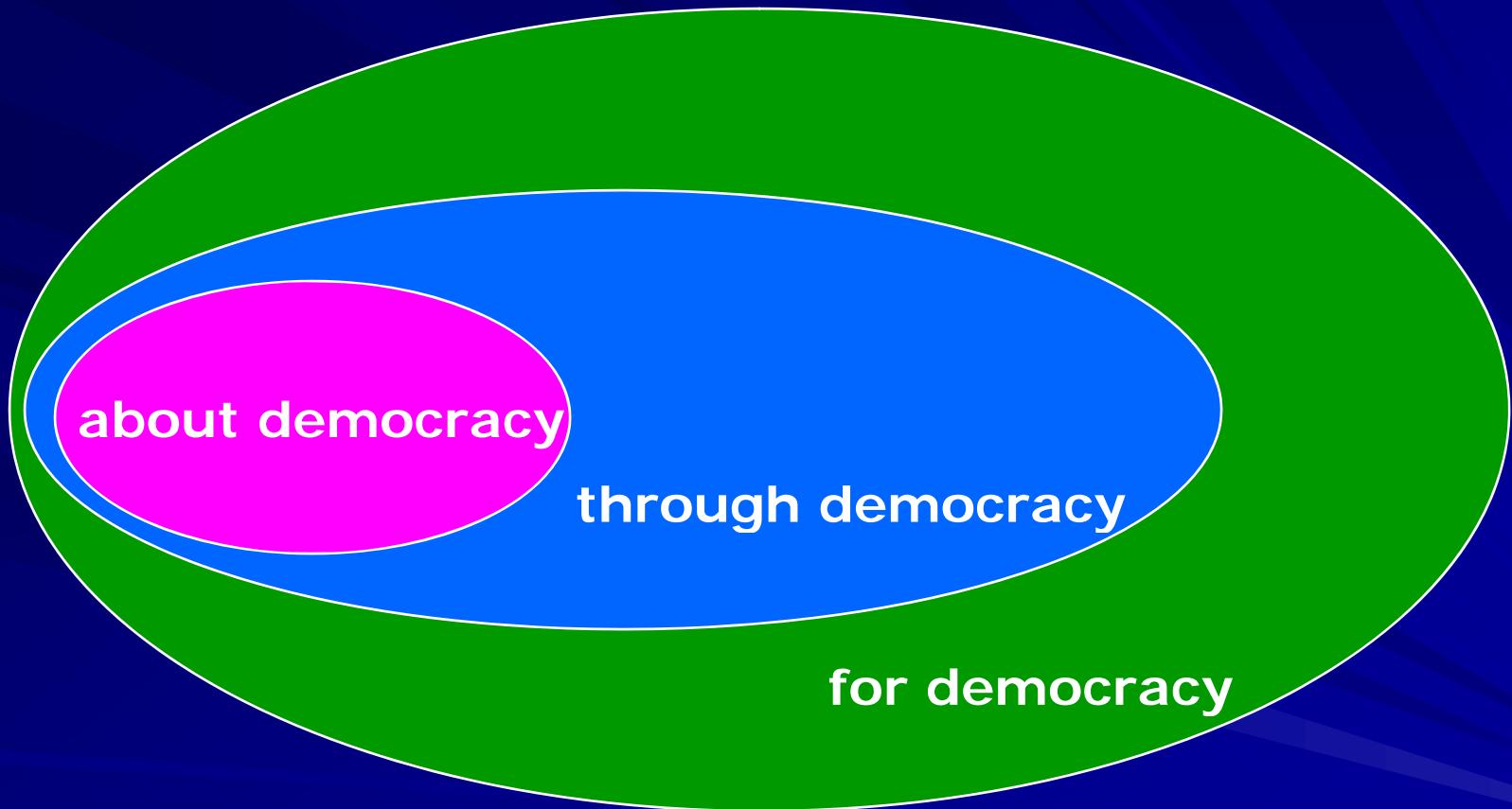
DEMOCRACY IS NOT INHERITED,
(DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN
DENGAN SENDIRINYA)



BUT IT IS LEARNED
(TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA
MELALUI PROSES BELAJAR)

PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI

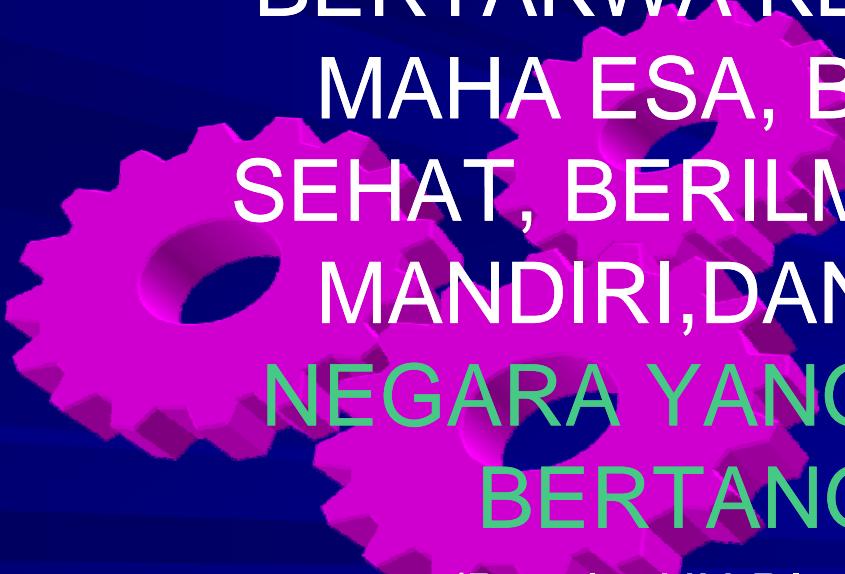
E
D
U
C
A
T
I
O
N



PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI

- MENGELOMPOKAN KEMAMPUAN DAN
- MEMBENTUK WATAK SERTA
PERADABAN BANGSA YANG
BERMARTABAT
- DALAM RANGKA MENCERDASKAN
KEHIDUPAN BANGSA

(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003)



PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN
UNTUK *BERKEMBANGNYA POTENSI*
PESERTA DIDIK AGAR MENJADI
MANUSIA YANG BERIMAN DAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG
MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA,
SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF,
MANDIRI,DAN MENJADI WARGA
NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN
BERTANGGUNG JAWAB

■ (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT?



KOMPETENSI WARGANEGARA

MAMPU MEMBUAT
KEPUTUSAN



SECARA BERNALAR &
BERTANGGUNGJAWAB

MELALUI PROSES
YANG DEMOKRATIS





*TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA*